

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Dwi Handayani ¹⁾

Rispantyo ²⁾

Bambang Widarno ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ dwi_h2@yahoo.co.id

²⁾ rispantyo@yahoo.co.id

³⁾ bwidarno@yahoo.com

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy demands of each local government to independently finance the expenditure areas, as indicated by increased economic growth. The purpose of this study were: to analyze the significance of the influence of regional revenue and Fund Balance partially or simultaneously to Economic Growth in Regency / City in Central Java. This study uses a case study in the District / City in Central Java for 2013-2015, the type of data used quantitative and qualitative data, the data source used secondary data. The samples are all regencies / cities in Central Java province a total of 35 districts / cities, so this study is a census study. Data analysis techniques used classical assumption test and multiple linear regression analysis, t-test, F and coefficient of determination. In conclusion, that there is a positive and significant influence local revenues to economic growth in the District / City in Central Java, meaning that if the local revenue increases it can increase economic growth. There is a positive and significant impact on economic growth of equalization funds in the District / City in Central Java, meaning that if the balancing fund increases it can increase economic growth. There is significant influence local revenues and equalization funds simultaneously on the dependent variable is economic growth in the District / City in Central Java.

Keywords: local revenues, equalization funds, economic growth.

PENDAHULUAN

Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, pelaksanaan otonomi daerah tersebut didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program pembangunan daerah) dan perencanaan lain yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada di daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan kemajuan masyarakat (Mohammad, Firma, dan Heribertus 2006: 185).

Adanya pemberlakuan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi pemerintah daerah yang dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah" (Sukirno, 2010: 9). Secara umum pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicirikan dengan adanya peningkatan pembangunan

infrastruktur sektor publik yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian rakyat dan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi, dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akan meningkatkan produktivitas.

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah lebih leluasa untuk menciptakan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik, karena pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya begitu juga sebaliknya. Namun, di lain pihak adanya kebijakan otonomi daerah tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan antara daerah satu dengan lainnya, karena Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki berbeda, menyebabkan pembangunan lebih besar di suatu daerah dan sementara di daerah lain tertinggal jauh.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal mengharuskan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi untuk peningkatan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor publik dipandang perlu dilakukan agar fasilitas publik dan penunjang lainnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan akan menarik investor untuk berinvestasi serta membuka usaha di daerah, tentunya hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam era otonomi daerah ini pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal), khususnya PAD karena kebijakan ini bersamaan dengan adanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun kondisi sebaliknya bisa terjadi jika terjadi eksploitasi PAD pada publik tanpa dibarengi kuantitas dan kualitas layanan publik yang memadai, akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon secara negatif (Mardiasmo, 2006: 44). Diharapkan dengan adanya penerimaan dari PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Desentralisasi fiskal di sisi lain memang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah masing-masing dan memanfaatkan sumber daya tersebut, namun kenyataan di lapangan tidaklah sejalan dengan harapan yang diinginkan. Namun, beberapa studi menemukan kemandirian daerah-daerah tersebut setelah otonomi daerah tidak meningkat bahkan dapat dikatakan menurun karena walaupun jumlah absolutnya meningkat namun persentase kenaikan PAD tidak lebih besar dari pada persentase kenaikan dari transfer Dana Perimbangan.

Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Salah satunya adalah kekuatan infrastruktur penunjang perekonomian daerah tidak tersebar merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Konsekuensi lain dari penerapan desentralisasi fiskal adalah setiap daerah dituntut untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah, namun tidak semua daerah dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah menggunakan PAD. Hal tersebut dikarenakan kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk

pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007) dan hal tersebut mengakibatkan tidak meratanya Pertumbuhan Ekonomi di setiap daerah.

Untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur yang terdapat di setiap daerah serta agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata, pemerintah pusat mengeluarkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

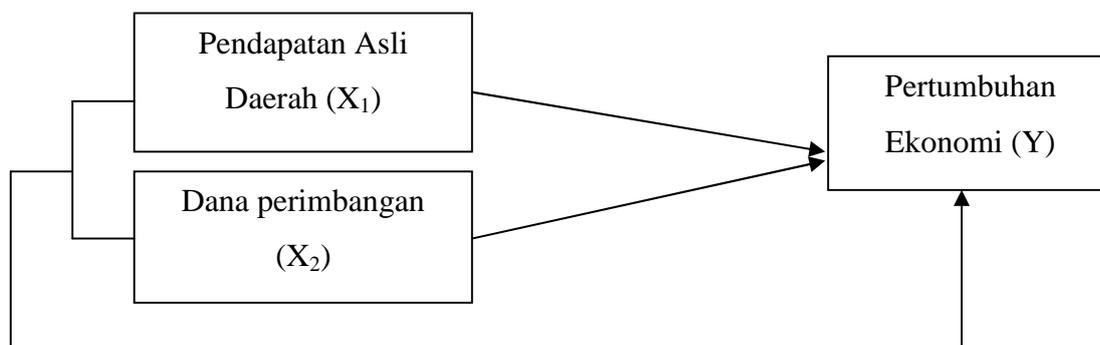
Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Gunantara dan Dwirandra (2014) menyimpulkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan yang diukur dari aspek DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sumartini dan Yasa (2015) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Tahar dan Zakhiya (2014) yang menyimpulkan bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian Suwandika dan Yasa (2015) menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini juga didukung penelitian Sumartini dan Yasa (2015) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial maupun secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kerangka Pemikiran

Untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan skripsi agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Dari skema kerangka pemikiran di atas, terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang termasuk variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Hipotesis

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi
PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian Rumanti (2009) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai CR sebesar 16,603. Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa besarnya PDRB untuk menilai Pertumbuhan Ekonomi ditentukan oleh besarnya PAD. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:
H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Hubungan Dana Perimbangan dengan Pertumbuhan Ekonomi
Sesuai pendapat Bahl dan Oates (Hadi, 2009:106-107) yang mengemukakan bahwa peranan Dana Perimbangan sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Khususnya dalam desentralisasi fiskal Dana Perimbangan akan mampu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Hasil penelitian Sihite (2009) yang menyimpulkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Najiah (2013) yang menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kota Depok. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:
H₂: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Pertumbuhan Ekonomi
Hadi (2009: 106) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat mempengaruhi meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan merupakan salah satu aspek dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari segi pengelolaan keuangan. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:
H₃: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus yang mencoba melihat pengaruh sesuatu atau beberapa variabel independen terhadap satu atau beberapa variabel dependen. Peneliti mencoba untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013 – 2015. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data sekunder. Sampel dalam penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota, sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus. Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (PLS).

Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini dihitung dengan rasio sebagai berikut:

$$PAD = \frac{PAD_{it} - PAD_{it-1}}{PAD_{it-1}} \times 100\% \text{ (Husna dan Sofia, 2013)}$$

Keterangan:

PAD_{it} = Pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota i pada periode t.

PAD_{it-1} = Pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota i pada periode t-1.

2. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

Dana perimbangan dalam penelitian ini dihitung dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \frac{DP_{it} - DP_{it-1}}{DP_{it-1}} \times 100\% \text{ (Husna dan Sofia, 2013)}$$

Keterangan:

DP_{it} = Dana perimbangan pada kabupaten/kota i pada periode t.

DP_{it-1} = Dana perimbangan pada kabupaten/kota i pada periode t-1.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah kondisi berkembangnya kegiatan dalam perekonomian sehingga mengalami peningkatan terhadap barang serta jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Indikator variabel ini dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_{it} - PDRB_{it-1}}{PDRB_{it-1}} \times 100\% \text{ (Tahar dan Zakhiya, 2014)}$$

Keterangan:

$PDRB_{it}$ = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

$PDRB_{it-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menilai produksi dan nilai tambah dengan harga pada tahun dasar, dengan demikian nilai PDRB ini dapat mencerminkan kenaikan riil nilai tambah tanpa dipengaruhi adanya perubahan harga. Salah satu pendekatan untuk menghitung PDRB atas dasar harga konstan adalah pendekatan ekstrapolasi, dengan cara mengalikan nilai tambah masing-masing sektor harga konstan pada tahun dasar 2000 dengan Indeks Produksi (tahun 2000=100). Indeks Produksi yang dipakai sebagai ekstrapolator merupakan indeks kuantum masing-masing komoditi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus sebagai berikut:

$$NTB_{(n,k,i)} = \frac{NTB_{(o,k,i)} \times IP_{(n)}}{100} \text{ (Badan Pusat Statistik, 2007)}$$

Keterangan:

- NTB = Nilai Tambah Bruto
- n = tahun berjalan
- k = atas dasar harga konstan 2000
- o = tahun dasar
- i = sektor/komoditi

Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS.
 - b. Uji autokorelasi dilakukan dengan *Run Test* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.
 - c. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
 - d. Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov melalui alat bantu komputer program SPSS.
2. Pengujian Hipotesis
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Tolerance (0,787); (0,787) > 0,1 VIF (1,271); (1,271) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	p (0,378) > 0,05	Tidak ada Autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	p (0,961); (0,560) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji normalitas	p (0,934) > 0,05	Residual normal

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2017

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014. Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig.
Constant	4,684	20,756	0,000
Pendapatan Asli daerah	0,018	3,622	0,000
Dana Perimbangan	0,030	2,682	0,009

Adjusted R Square = 0,107
F-hitung = 7,208
Sig. F = 0,001

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = 4,684 + 0,018X_1 + 0,030X_2$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a : 4,684 artinya jika pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi (Y) adalah positif sebesar 4,684%.
- b_1 : 0,018 artinya pengaruh variabel pendapatan asli daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah positif, artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat sebesar 1% maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,018% pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan asumsi variabel dana perimbangan (X_2) dianggap tetap.
- b_2 : 0,030 artinya pengaruh variabel dana perimbangan (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah positif, artinya apabila dana perimbangan meningkat sebanyak 1% maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,030% pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan asumsi variabel pendapatan asli daerah (X_1) dianggap tetap.

3. Uji t

- a. Pengujian signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,622 dengan *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.
- b. Pengujian signifikansi pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi
Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,682 dengan *probability value* sebesar $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan dana perimbangan (X_2) terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

4. Uji F

Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 7,208 dengan *probability value* sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) secara simultan terhadap variabel

terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

5. Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,107 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebesar 10,7% sedangkan sisanya ($100\% - 10,7\%$) = 89,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti, misalnya investasi, jumlah perusahaan, jumlah angkatan kerja dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan pendapatan daerah yang berupa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan pada masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Tengah sebagian besar terserap untuk belanja pegawai. Hal ini mengakibatkan kontribusi pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memberikan kontribusi yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,622 dengan *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Gunantara dan Dwirandra (2014) dan Suwandika dan Yasa (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,682 dengan *probability value* sebesar $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan dana perimbangan (X_2) terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa dana perimbangan yang diterima oleh daerah dapat digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, sehingga peran dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan yang diterima daerah dapat dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Gunantara dan Dwirandra (2014) serta penelitian Sumartini dan Yasa (2015) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 7,208 dengan *probability value* sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”, terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Gunantara dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengujian pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengujian pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang positif dan signifikan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, artinya apabila dana perimbangan meningkat maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengujian pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*.
- Gunantara, Putu Candra dan A.A.N.B.Dwirandra. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi di Bali”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 7 No. 3. Hal. 529-546.
- Hadi, Sasana. 2009. “Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 10 No.1. Hal. 1-14.
<http://jateng.bps.go.id>. Jawa Tengah dalam Angka.
- Husna, Asmaul dan Myrna Sofia. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau”. *JEMI*. Vol. 4, No. 2. Hal 01-12.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mohammad, Mahsun, Sulistyowati Firma, dan Heribertus. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. BPF. Yogyakarta.
- Najiah, Laeni. 2013. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap PDRB di Kota Depok Periode 2001-2010”. *Jurnal Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rumanti, Indah Ari. 2009. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota se Provinsi Jawa dan Bali”. *Jurnal Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

- Sihite, Friska. 2009. "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara". *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana. Jakarta.
- Sumartini, Ni Komang Ayuk dan I.G.W. Murjana Yasa. 2015. "Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Provinsi Bali". *E-Jurnal EP Unud*. Volume 4 No. 4. Hal. 258-271.
- Suwandika, Putu Eka dan I Nyoman Mahaendra Yasa. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali". *E- Jurnal EP Unud*. Volume 4 No. 7. Hal. 794-810.
- Tahar, Afrizal dan Maulida Zakhya. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 12 No. 1. Hal. 88-99.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.